

## PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DALAM PENGEMBANGAN USAHA BUM DESA UNTUK MANAJEMEN BUM DESA DI KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

Putu Sukma Kurniawan<sup>1</sup>, Luh Gede Kusuma Dewi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha  
Email:putusukma@undiksha.ac.id

### ABSTRACT

*The Village-Owned Enterprise plays a pivotal role in the local economy, exerting a considerable influence on the growth and development of the village. At the present time, the community in the village is engaged in a significant initiative to establish a business unit. This is due to the fact that the village possesses a plethora of resources that can be leveraged by the local community to enhance the well-being of its residents. It is evident that the development of this Village-Owned Enterprise necessitates a comprehensive business plan. The initial observation with the management of the Village-Owned Enterprise in Kubutambahan District, Buleleng Regency, revealed a desire to develop business potential in the future. In order for Village-Owned Enterprises to drive the village economy and perform well, they require effective management. This is necessary for them to be able to compete and carry out their functions properly. It is therefore essential that the management of the Village-Owned Enterprise possesses the requisite competence to prepare a business plan. In some cases, this competence is not yet present within the management of the Village-Owned Enterprise, necessitating the input of academicians from universities through community service activities. It is hoped that this community service activity will provide positive benefits and meaningful changes in addressing the issues faced by the target audience in the context of business development from the Village-Owned Enterprise.*

**Keywords:** *business development, business plan, village-owned enterprise*

### ABSTRAK

Organisasi bisnis BUM Desa merupakan penggerak ekonomi dalam konteks komunitas lokal (desa) dan memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi di desa. Saat ini, inisiatif masyarakat atau komunitas sosial di desa untuk membangun unit usaha sangat besar. Hal ini dikarenakan desa dalam konteks ekonomi memiliki banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan. Pengembangan BUM Desa ini tentu memerlukan perencanaan bisnis yang komprehensif. Kondisi di lapangan pada saat observasi awal dengan manajemen BUM Desa menunjukkan bahwa adanya keinginan dari BUM Desa di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, untuk mengembangkan potensi usaha kedepannya. BUM Desa sebagai badan usaha pendorong perekonomian desa memerlukan pengelolaan yang maksimal agar mampu menciptakan kinerja yang baik, sehingga mampu bersaing dan menjalankan fungsinya dengan baik. Dengan demikian, maka kompetensi manajemen BUM Desa dalam menyusun sebuah rencana bisnis mutlak untuk dimiliki. Terkadang kompetensi ini belum dimiliki oleh manajemen BUM Desa sehingga diperlukan adanya pendampingan dari akademisi di universitas melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat. Dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan akan memberikan manfaat positif dan perubahan yang berarti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi oleh khalayak sasaran dalam konteks pengembangan bisnis dari organisasi BUM Desa.

**Kata kunci:** *badan usaha milik desa, pengembangan bisnis, rencana bisnis*

### PENDAHULUAN

Organisasi bisnis BUM Desa merupakan penggerak ekonomi dalam konteks komunitas lokal (desa) dan memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi di desa

(Larasdiputra et al., 2019). Saat ini, inisiatif masyarakat atau komunitas sosial di desa untuk membangun unit usaha sangat besar (Kania et al., 2021). Hal ini dikarenakan desa dalam konteks ekonomi memiliki banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa

untuk peningkatan kesejahteraan. Sumber daya ekonomi di desa ini sebaiknya diintegrasikan dan dikelola secara profesional layaknya unit bisnis pada umumnya. Terlebih lagi, telah dikeluarkannya Permendesa PDPTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa dapat dipergunakan oleh masyarakat desa dalam membangun unit bisnis yang bersifat otonom. Dengan demikian, masyarakat desa dapat mengenali potensi ekonomi desa dan bersama-sama membangun unit bisnis desa untuk peningkatan kesejahteraan bersama (Sofyani et al., 2019).

Saat ini, desa juga memiliki hak untuk membentuk sebuah organisasi bisnis desa yang umum dikenal dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa merupakan organisasi bisnis desa yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi ekonomi desa yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan secara keseluruhan pada desa (Anggraeni, 2016; Ramadana et al., 2013; Tama, 2013; Widyastuti, 2017). Pemahaman mengenai BUM Desa diperjelas lagi pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pendirian BUM Desa dapat diartikan bahwa masyarakat desa memiliki komitmen yang tinggi untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki desa (Badaruddin et al., 2020). BUM Desa juga merefleksikan bagaimana masyarakat desa secara bersama-sama ingin mengurangi kesenjangan yang ada di desa. Keberadaan BUM Desa dalam ekosistem desa merupakan bentuk kepemilikan mutlak masyarakat desa terhadap potensi ekonomi desa. Faedlulloh (2018) menjelaskan bahwa BUM Desa merupakan organisasi bisnis yang dimiliki oleh masyarakat desa dan mencerminkan kepemilikan masyarakat. BUM Desa merupakan sebuah skema organisasi partisipatoris dimana masyarakat desa dapat terlibat di dalam pengelolaan BUM Desa (Faedlulloh, 2018). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa BUM Desa akan dapat berkembang dengan baik jika seluruh masyarakat desa dapat berpartisipasi

dalam mengelola BUM Desa. Mardiono et al. (2022) turut menjelaskan bahwa pemberdayaan dan pengelolaan BUM Desa dapat dilakukan dengan skema partisipasi komunitas. Skema ini mendorong komunitas-komunitas sosial di desa untuk turut serta memberikan saran dan kritik dalam pengelolaan BUM Desa. Jika didefinisikan secara luas, skema partisipasi komunitas ini akan mendorong adanya kesadaran warga bahwa peran BUM Desa sangat penting untuk kesejahteraan desa (Sumual & Wahyuni, 2021).

Pengembangan BUM Desa ini tentu memerlukan perencanaan bisnis yang komprehensif. Kondisi di lapangan pada saat observasi awal dengan manajemen BUM Desa menunjukkan bahwa adanya keinginan dari BUM Desa yang berada di Kecamatan Kubutambahan untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang perencanaan bisnis dan penyusunan proposal bisnis. BUM Desa sebagai badan usaha pendorong perekonomian desa memerlukan pengelolaan yang maksimal agar mampu menciptakan kinerja yang baik, sehingga mampu bersaing dan menjalankan fungsinya dengan baik. Dengan demikian, maka kompetensi manajemen BUM Desa dalam menyusun sebuah rencana bisnis mutlak untuk dimiliki. Terkadang kompetensi ini belum dimiliki oleh manajemen BUM Desa sehingga diperlukan adanya pendampingan dari akademisi di universitas melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat.

Permasalahan yang ada di lapangan adalah mengenai strategi pengembangan usaha yang mana dalam kasus ini adalah BUM Desa Valli Karya Lestari yang berlokasi di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng berencana untuk mengembangkan unit usaha yang baru. Hal ini telah disampaikan dalam wawancara dan observasi secara langsung dengan Bapak Komang Agus selaku Direktur BUM Desa Valli Karya Lestari yang berlokasi di Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan. Bapak Komang Agus menyampaikan kegelisahannya menghadapi cara untuk mengembangkan rencana bisnis BUM Desa dan menyampaikan rencana

tersebut kepada pihak pemerintah Desa. Manajemen BUM Desa belum memiliki kompetensi dalam menyusun sebuah rencana bisnis dalam konteks pengembangan usaha BUM Desa. Kondisi di BUM Desa Valli Karya Lestari ini secara umum terjadi pada BUM Desa lain yang berada di Kecamatan Kubutambahan. Permasalahan ini tentu harus diberikan solusi sehingga manajemen BUM Desa di Kecamatan Kubutambahan memiliki kompetensi dan persepsi yang sama mengenai penyusunan konsep perencanaan bisnis.

Disinilah peran besar Civitas Akademika Universitas Pendidikan Ganesha sebagai warga dan lembaga yang memberikan ilmu pengetahuan kepada khalayak melalui program pengabdian kepada masyarakat (PkM). Salah satu program yang dapat dilaksanakan adalah pelatihan penyusunan rencana bisnis dalam konteks pengembangan usaha BUM Desa bagi manajemen BUM Desa yang ada di Kecamatan Kubutambahan. Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan PkM ini dirancang untuk memberikan wawasan mengenai pengembangan bisnis dan penyusunan rencana bisnis berlandaskan pada PP No. 11 tahun 2021 tentang BUM Desa. Sehingga manfaat praktis yang dapat dirasakan adalah manajemen BUM Desa mampu memahami materi yang dipaparkan dan mengikuti proses pendampingan sehingga mendapatkan solusi yang aplikatif terhadap permasalahan yang ada di BUM Desa di Kecamatan Kubutambahan.

Kegiatan PkM ini juga dirancang untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait. Pelibatan ini sangat penting agar terjadi kolaborasi dalam penyusunan rencana bisnis dan pengembangan usaha BUM Desa. Pengelolaan BUM Desa memerlukan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan yang terkait. Chintary & Lestari (2016) telah mencoba untuk menjelaskan bagaimana peran dari pemerintah desa dalam pengelolaan BUM Desa. Kolaborasi dari pemangku kepentingan terkait merupakan bentuk partisipasi dan komitmen yang tinggi dalam pengelolaan BUM Desa dari keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan

BUM Desa. Dalam konteks yang lebih luas, semua komponen di desa memiliki kewajiban yang sama dalam pengelolaan BUM Desa, termasuk dalam proses monitoring dan pengawasan dalam pengelolaan bisnis BUM Desa. Tentu saja peran dari pemangku kepentingan ini disesuaikan dengan tugas dan kedudukannya dari perspektif BUM Desa.

Berdasarkan permasalahan diatas maka kegiatan PkM ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dari manajemen BUM Desa yang berada di Kecamatan Kubutambahan dalam menyusun rencana bisnis dan pengembangan usaha BUM Desa dengan cara:

1. Mengedukasi khalayak sasaran (manajemen BUM Desa di Kecamatan Kubutambahan) mengenai penyusunan rencana bisnis organisasi melalui pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh tim PkM Universitas Pendidikan Ganesha;
2. Meningkatkan kompetensi khalayak sasaran untuk mengidentifikasi potensi bisnis bagi pengembangan usaha BUM Desa melalui kegiatan pelatihan dan monitoring pasca kegiatan PkM.

Kegiatan PkM ini juga memiliki latar belakang untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada para manajemen BUM Desa dalam pengembangan bisnis BUM Desa. Tim PkM berpendapat bahwa BUM Desa saat ini telah memiliki peran yang sangat krusial dalam konteks ekonomi desa. Sebagai bagian dari ekosistem bisnis dalam konteks komunitas lokal, organisasi BUM Desa memiliki peran dan tanggung jawab untuk turut berperan serta dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan pembangunan berkelanjutan desa (*SDGs* Desa) (Yuliana & Alinsari, 2022). BUM Desa merupakan organisasi bisnis desa yang disusun berdasarkan karakteristik desa dan memiliki tugas untuk memaksimalkan potensi desa. Pemaksimalan potensi desa ini dapat didefinisikan bahwa BUM Desa memperoleh kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat desa untuk mengelola sumber daya di desa dengan tujuan untuk kesejahteraan desa. Dengan pemahaman ini, maka BUM Desa

memiliki peran yang krusial dalam pengelolaan sumber daya desa dan peningkatan ekonomi desa. Anggraeni (2016) menjelaskan bagaimana BUM Desa dapat berperan pada kesejahteraan masyarakat pedesaan. Lebih lanjut, Arifin et al. (2020) menjelaskan bahwa adanya dana desa cenderung untuk meningkatkan kuantitas dari pembentukan BUM Desa. Pembentukan BUM Desa ini tentu harus diimbangi dengan penyiapan sumber daya manusia yang baik sehingga terbentuknya BUM Desa dapat menjadi sarana bagi masyarakat desa untuk memaksimalkan potensi desa (Pradnyani, 2019). Dari beberapa peran ini, dapat dilihat bahwa BUM Desa dapat menjadi pendorong bagi komunitas-komunitas di desa untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Dengan demikian, BUM Desa tidak lagi menunggu masyarakat desa tetapi mendorong dan memberikan inisiatif bagaimana cara untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang ada di desa. Ramadana et al. (2013) berpendapat bahwa keberadaan BUM Desa dapat diartikan sebagai penguatan ekonomi desa. Penguatan ekonomi desa ini dapat diartikan bahwa semua komunitas di desa secara bersama-sama memiliki komitmen untuk mencapai kesejahteraan bersama. Terlebih lagi, BUM Desa yang telah berbadan hukum akan dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat desa (Ayuningtyas & Wibawani, 2022). Penjelasan ini menjadi sebuah argumentasi yang logis bahwa kegiatan PkM yang bertujuan untuk memberikan kompetensi mengenai penyusunan perencanaan bisnis dan dokumen proposal bisnis sangat penting untuk membantu dalam pengembangan BUM Desa di masa depan.

## **METODE**

Pelaksanaan PkM dengan skim pengembangan IPTEKS yang mengambil tema mengenai penyusunan rencana bisnis BUM Desa ini dilakukan dengan metode pelatihan dan monitoring. Kegiatan PkM ini dilaksanakan di Kecamatan Kubutambahan. Kegiatan ini diawali dari tahap peninjauan mitra BUM Desa di

Kecamatan Kubutambahan. Peninjauan ini membahas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan sekaligus mengundang manajemen BUM Desa untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan ini. Kemudian, dilanjutkan dengan penyusunan materi serta persiapan pelatihan dan pendampingan. Pemberian pelatihan dan pendampingan dengan materi yang telah disiapkan sebelumnya oleh tim PkM. Pelatihan akan difokuskan dalam satu hari dan pendampingan akan difokuskan pada hari lainnya dan sesuai dengan kebutuhan dari manajemen BUM Desa. Kegiatan PkM dilaksanakan pada tanggal 6 September 2024 dengan mengambil lokasi di kantor kepala desa, Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan. Peserta kegiatan PkM adalah manajemen BUM Desa yang berasal dari Desa Bengkala, Desa Bila, dan Desa Tamblang. Dengan demikian, tiga BUM Desa telah terlibat dalam kegiatan PkM ini.

Kegiatan pelatihan ini juga melakukan monitoring pasca dilakukannya pelatihan. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen BUM Desa mampu untuk menyusun rencana bisnis organisasi dan mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam proses penyusunan rencana bisnis. Kegiatan monitoring dilakukan dengan koordinasi bersama pemerintah desa sehingga kolaborasi semua pemangku kepentingan dapat terus dilakukan.

Evaluasi kegiatan pelatihan dan pendampingan dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test*. Tahap pertama sebelum kegiatan dimulai dilakukan *pre-test* untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman khalayak sasaran terhadap konsep dari rencana bisnis dan bagaimana menyusun sebuah rencana bisnis. Tahap selanjutnya dilakukan *post-test* yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan instrumen yang sama. Kegiatan pelatihan ini dinyatakan berhasil apabila skor *post-test* peserta  $\geq 75\%$  dari skor maksimal dan manajemen BUM Desa memahami materi pelatihan. Keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat juga dari antusiasme peserta mengikuti kegiatan.

Evaluasi lainnya dari kegiatan PkM ini dapat dilihat dari selesainya dokumen rencana bisnis yang disusun oleh manajemen BUM Desa. Pasca kegiatan PkM, manajemen akan diberikan waktu untuk menyusun sebuah dokumen rencana bisnis. Kemudian, tim PkM akan memeriksa kualitas dari dokumen rencana bisnis tersebut untuk melihat evaluasi dan kesuksesan dari kegiatan PkM. Tim PkM memberikan saran dan masukan terhadap isi dari proposal rencana bisnis yang telah disusun oleh manajemen BUM Desa. Hal ini sangat penting agar manfaat dari kegiatan PkM dapat terus berlanjut dan dapat mendampingi manajemen BUM Desa dalam memperbaiki kualitas proposal bisnisnya.

Adapun alur kegiatan pelatihan yang dirancang kali ini meliputi:

1. Melalui pelatihan dan pendampingan, khalayak sasaran dapat memahami cara mengembangkan sebuah rencana bisnis yang sesuai untuk karakteristik BUM Desa. Indikator keberhasilannya adalah melalui *pre-test* dan *post-test* serta manajemen mampu menyusun sebuah dokumen rencana bisnis. *Pre-test* dipergunakan untuk mengukur pemahaman awal manajemen BUM Desa mengenai konsep perencanaan bisnis. *Post-test* dipergunakan untuk mengukur pasca dilakukannya kegiatan PkM.
2. Melalui pelatihan dan pendampingan, khalayak sasaran dapat memahami cara mengidentifikasi potensi bisnis yang dapat

dikembangkan. Indikator keberhasilannya adalah manajemen BUM Desa mampu melakukan identifikasi rencana bisnis di masa depan dan menyusunnya dalam proposal bisnis.

Sesuai dengan tahapan kegiatan PkM yang telah dijelaskan sebelumnya, maka alur pemikiran kegiatan tersebut akan disajikan dalam bagan alur berikut ini:

1. Landasan pelaksanaan kegiatan PkM adalah adanya keinginan dari manajemen BUM Desa untuk menyusun perencanaan bisnis. Adanya hambatan dan kendala dalam proses penyusunan menjadi alasan logis dilaksanakannya kegiatan PkM.
2. Tim PkM Universitas Pendidikan Ganesha memberikan solusi melalui kegiatan PkM untuk menyusun proposal bisnis BUM Desa.
3. Kegiatan PkM dilaksanakan dengan berfokus pada pelatihan dan pendampingan kepada manajemen BUM Desa.
4. Luaran dari kegiatan PkM adalah manajemen BUM Desa telah memiliki kompetensi yang baik dalam menyusun perencanaan bisnis dan menuliskannya dalam proposal bisnis BUM Desa.



Gambar 1. Bagan alur kegiatan pengabdian pada masyarakat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian dimulai dengan melakukan observasi dan wawancara awal dengan manajemen BUM Desa. Pada tahap ini, diperoleh data bahwa manajemen BUM Desa belum memahami dengan baik cara untuk menyusun perencanaan bisnis yang nantinya dapat disusun dalam sebuah dokumen formal berupa proposal bisnis BUM Desa. Oleh karena itu, perancangan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini disesuaikan dengan kebutuhan dari para manajemen BUM Desa.

Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dilakukan pada tanggal 6 September 2024. Sebelum memulai kegiatan pelatihan penyusunan proposal bisnis, tim PkM melakukan *pre-test* untuk mengetahui sejauh mana manajemen BUM Desa memahami mengenai perencanaan bisnis dan memahami dalam penyusunan sebuah proposal bisnis. Dari tahapan *pre-test*, dapat diperoleh hasil bahwa manajemen BUM Desa telah memahami mengenai konsep perencanaan bisnis, namun belum dapat merumuskannya dalam sebuah dokumen yang bersifat formal.

Kegiatan PkM kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi dan pelatihan mengenai penyusunan rencana bisnis dan penulisan sebuah dokumen proposal bisnis. Pada tahapan ini, tim PkM memberikan materi mengenai konsep *business model canvas* dan bagaimana menggunakan *business model canvas* untuk menganalisis kondisi bisnis eksisting dari BUM Desa. Tim PkM juga menjelaskan cara menggunakan *business model canvas* untuk mengidentifikasi lini-lini bisnis baru yang

dapat dikembangkan oleh BUM Desa. Selanjutnya, peserta kegiatan PkM diminta untuk menggunakan *business model canvas* untuk mengidentifikasi kondisi eksisting dari BUM Desa dan bagaimana rencana bisnis di masa depan.

Tahapan pelatihan berikutnya dilakukan dengan membahas mengenai penyusunan sebuah proposal bisnis kepada manajemen BUM Desa. Dalam tahapan ini, manajemen BUM Desa diberikan format sebuah dokumen proposal bisnis dan diminta untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat dituliskan pada proposal bisnis tersebut. Tahapan ini sangat penting agar manajemen BUM Desa dapat memahami struktur dari sebuah proposal bisnis dan hal apa saja yang dapat dituliskan dalam proposal tersebut.



Gambar 2. Peserta kegiatan PKM



Gambar 3. Pemberian materi PKM

Tahapan akhir pada kegiatan pelatihan adalah memberikan *post-test* kepada peserta PkM. Pemberian *post-test* dilakukan dengan melakukan wawancara kepada manajemen BUM Desa terkait materi yang telah diberikan. Secara umum, peserta kegiatan PkM telah memberikan pemahamannya mengenai isi dari proposal bisnis dan bagaimana menuliskan rencana kerja BUM Desa dalam proposal bisnis. Hal ini mengindikasikan bahwa peserta kegiatan PkM telah mendapatkan pemahaman baru dan diharapkan pemahaman tersebut dapat diinternalisasi dengan baik dan disebarluaskan kepada pengurus BUM Desa, sehingga seluruh manajemen BUM Desa memiliki persepsi yang sama mengenai urgensi dari penyusunan sebuah proposal bisnis.

Untuk tahapan selanjutnya dari kegiatan PkM, tim PkM telah meminta manajemen BUM Desa yang menjadi peserta kegiatan PkM untuk menyusun sebuah dokumen proposal bisnis. Nantinya, tim PkM akan melakukan proses *review* dan memberikan saran serta masukan terkait dengan dokumen proposal bisnis yang telah disusun oleh manajemen BUM Desa. Ini merupakan tahapan monitoring dan evaluasi dari kegiatan PkM. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa peserta kegiatan PkM telah memiliki kompetensi dalam menyusun proposal bisnis dan memastikan tidak terdapat kendala dalam proses penyusunannya.

Secara umum, tim PkM berharap bahwa kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada manajemen BUM Desa. Saat ini, BUM Desa memegang peranan yang krusial dalam konteks pengembangan ekonomi pedesaan. Dengan menjadi sebuah organisasi berbadan hukum, BUM Desa telah berubah menjadi organisasi bisnis yang profesional dan independen. Lebih lanjut, Sinarwati et al. (2022) menjelaskan bahwa keberadaan

BUM Desa di sebuah desa dapat mendorong kualitas usaha-usaha kecil yang dimiliki oleh masyarakat desa. BUM Desa dapat menjadi hilir dari seluruh aktivitas ekonomi di desa dan dapat menjadi rumah besar bagi pemasaran hasil-hasil produk masyarakat desa. Anggraeni (2016) menjelaskan bahwa peran dari BUM Desa sangat krusial bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan. Mardiono et al. (2022) juga berpendapat bahwa peran BUM Desa yang sangat penting dalam pengelolaan ekonomi desa sebaiknya didasarkan pula pada kearifan lokal desa (*local wisdom*) sehingga BUM Desa memiliki etika dan nilai dalam aktivitasnya. Faedlulloh (2018) berpendapat bahwa BUM Desa dapat menjadi sarana bagi masyarakat desa untuk belajar berdemokrasi dalam konteks ekonomi. Dengan begitu pentingnya peran BUM Desa dalam konteks ekonomi desa, kegiatan PkM ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar kepada manajemen BUM Desa dalam menyusun perencanaan bisnis dari BUM Desa.

## **SIMPULAN**

Secara umum, kegiatan PkM dilakukan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh khalayak sasaran. Dalam konteks ini, kegiatan PkM dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dari manajemen BUM Desa untuk menyusun perencanaan bisnis dan menulis sebuah proposal bisnis BUM Desa. Kegiatan PkM ini diharapkan memiliki luaran yang dapat membantu manajemen BUM Desa untuk menyusun proposal bisnis. Selain itu, kegiatan PkM ini diharapkan dapat terus berlanjut melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Kedepannya, kegiatan PkM yang berfokus pada penyusunan perencanaan bisnis BUM

Desa akan terus dilakukan guna mendukung pengembangan BUM Desa di masa depan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDES di Gunung Kidul, Yogyakarta. *MODUS*, 28(2).
- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A. H., Ariutama, G. A., Djuned, P., Rahman, A. B., & Handoko, R. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79, 382–394. <https://doi.org/10.1016/J.JRURSTUD.2020.08.052>
- Ayuningtyas, D. D., & Wibawani, S. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 281–286. <https://doi.org/10.31258/JKP.V13I3.8095>
- Badaruddin, B., Kariono, K., Ermansyah, E., & Sudarwati, L. (2020). Village community empowerment through village owned enterprise based on social capital in North Sumatera. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, 31(3), 163–175. <https://doi.org/10.1080/02185385.2020.1765855>
- Chintary, V. Q., & Lestari, A. W. (2016). Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2).
- Faedlulloh, D. (2018). BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris. *Journal of Governance*, 3(1). <https://doi.org/10.31506/JOG.V3I1.3035>
- Kania, I., Anggadwita, G., & Alamanda, D. T. (2021). A new approach to stimulate rural entrepreneurship through village-owned enterprises in Indonesia. *Journal of Enterprising Communities*, 15(3), 432–450. <https://doi.org/10.1108/JEC-07-2020-0137/FULL/XML>
- Larasdiputra, G. D., Anggiriawan, P. B., Kawisana, P. G. W. P., & Putra, I. G. B. Ngr. P. (2019). The Role of Village Owned Enterprises in Increasing the Rural Economy. *International Journal of Advances in Social and Economics*, 1(2), 60. <https://doi.org/10.33122/IJASE.V1I2.41>
- Mardiono, A., Somp, A. T., & Syafari, M. R. (2022). Empowerment of Village-Owned Business Entities (Bumdes) Baringin B Candi Laras District, Tapin Regency, South of Kalimantan Province. *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues*, 2(1), 21–29.
- Pradnyani, N. L. P. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2). <https://doi.org/10.36733/JUARA.V9I2.602>
- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Lndungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1068–1076.
- Sinarwati, N. K., Dewi, L. G. K., Sugiantara, F., Wasuka, B. P., &

- Safitri, S. A. (2022). Model for Increasing Micro and Small Enterprises Performance through Optimizing the Role of BUMDes. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 6(2), 379–393.  
<https://doi.org/10.23887/JIA.V6I2.40379>
- Sofyani, H., Atmaja, R., & Rezki, S. B. (2019). Success Factors of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Performance in Indonesia: An Exploratory Study. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2), 44–58.  
<https://doi.org/10.18196/JAI.2002116>
- Sumual, E. W., & Wahyuni, E. T. (2021). Village-Owned Enterprise (BUMDes) Business Unit Determination Model with Social Enterprise Concept in West Java. *The 1st International Conference on Regional Economic and Development*.  
<https://doi.org/10.32698/ICRED.0493>
- Tama, D. O. (2013). *Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Widyastuti, Y. (2017). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Kesejahteraan Masyarakat pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Yuliana, E., & Alinsari, N. (2022). Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2919–2929.  
<https://doi.org/10.33395/OWNER.V6I3.945>